



## Deteritorialisasi Lingkungan dan Bentuk-Bentuk Alih Fungsi Lahan Basah di Kabupaten Banjar (Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut)

M Najeri Al Syahrin<sup>1)</sup>, Ismar Hamid<sup>2)</sup>

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

[Najeri.syahrin@ulm.ac.id](mailto:Najeri.syahrin@ulm.ac.id)<sup>1)</sup>

[Ismar.hamid@ulm.ac.id](mailto:Ismar.hamid@ulm.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana deteritorialisasi lingkungan dan bentuk-bentuk alih fungsi lahan di Kabupaten Banjar secara khusus yang dilakukan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut. Selain itu, penelitian ini juga dimunculkan untuk merespons dinamika ekspansi pengalihfungsian lahan baik yang dilakukan korporasi (industri), pemerintah maupun oleh masyarakat. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan instrumen observasi *live in*, FGD dan *in depth interview*, yang dikolaborasi dengan studi literatur untuk menelaah dan memahami bagaimana deteritorialisasi lingkungan lahan basah dan bentuk-bentuk alih fungsi lahan yang dilakukan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa di Kabupaten Banjar kepentingan perluasan kota menjadi aspek paling dominan dalam menyebabkan masifnya alih fungsi lahan basah. Dimana pembangunan perumahan di Kecamatan Kertak Hanyar dan gudang industri di Kecamatan Gambut merupakan bentuk alih fungsi lahan basah yang paling dominan. Adapun bagian-bagian dari ekosistem yang paling banyak dialihfungsikan adalah lahan-lahan yang sebelumnya digunakan untuk lahan pertanian, wilayah rawa-rawa yang sebelumnya menjadi penyedia kebutuhan ikan bagi masyarakat, serta sungai-sungai kecil dan sedang yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur air untuk lahan pertanian dan sarana transportasi bagi masyarakat. Deteritorialisasi dan alih fungsi lahan ini tentu memberikan beberapa implikasi serius tidak hanya bagi lingkungan lahan basah secara fisik saja namun juga turut memberikan dampak terhadap perubahan sosio-kultural masyarakat.

**Kata Kunci:** Deteritorialisasi lahan, alih fungsi lahan, lingkungan, lahan basah.

### Abstract

This research aims to find out how environmental deterritorialization and forms of land conversion in Banjar Regency are carried out specifically in Kertak Hanyar District and Gambut District. Apart from that, this research was also created to respond to the dynamics of land conversion expansion carried out by corporations (industry), the government and the community. This research was developed using a qualitative research approach. This research is field research using live-in observation instruments, FGDs and in-depth interviews, which is collaborated with literature studies to examine and understand how the deterritorialization of the wetland environment and the forms of land conversion are carried out. The research results describe that in Banjar Regency the importance of urban expansion is the most dominant aspect in causing massive conversion of wetland functions. Where housing construction in Kertak Hanyar District and industrial warehouses in Gambut District are the most dominant forms of wetland conversion. The parts of the ecosystem that are most frequently converted are land that was previously used for agricultural land, swamp areas that previously provided fish for the community, and small and medium rivers that previously functioned as waterways for agricultural land. and means of transportation for the community. This deterritorialization and land conversion certainly has several serious implications not only for the physical wetland environment but also has an impact on socio-cultural changes in society.

**Keywords:** Land deterritorialization, land use change, environment, wetlands



## PENDAHULUAN

Deteritorialisasi lahan seringkali menggunakan alasan industrialisasi dan pembangunan ekonomi negara. Permasalahan muncul kemudian yang pada akhirnya membentuk perubahan lanskap lingkungan, khususnya lingkungan lahan basah. Kawasan lingkungan lahan basah termasuk kawasan rawa dan gambut sebagai paru-paru dunia kini banyak hilang dengan kebijakan industri, pemukiman dan perkebunan monokultur (Goldblatt, 2015).

Hubungan yang timpang dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA), termasuk penghilangan objek-objek agraria. Di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Banjar sebagian besar berfungsi sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, karena secara geografis terletak di kawasan strategis antara kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru. Aksesibilitas yang tinggi menjadikan Kabupaten Banjar sebagai salah satu pusat pengembangan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi dan industri. Tumbuhnya kegiatan pembangunan dan perekonomian yang tinggi memicu perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan industri, perdagangan jasa, dan hunian. Penggunaan lahan yang tidak tepat dapat menjadi bencana bagi lingkungan dan kehidupan manusia (Krisnaningtyas & Trimarmanti, 2014).

Deteritorialisasi lingkungan di Kabupaten Banjar terjadi sangat masif. Kawasan gambut dan Kertak Hanyar sebagai lumbung padi sudah banyak yang beralih fungsi dari kawasan pertanian menjadi kawasan sektor perdagangan dan jasa termasuk peralihan menjadi kawasan pemukiman baru. Juga semakin dikhawatirkan seiring dengan adanya rencana isu pengembangan kawasan Gambut Raya sebagai areal perluasan baru (BPS, 2019; BPS 2020)

Indikasi perluasan deteritorialisasi lingkungan yang disertai dengan perampasan tanah masyarakat dalam beberapa tahun terakhir juga masih menunjukkan kecenderungan tata kelola lingkungan yang berpihak pada kepentingan politik dan tujuan komersial, yang diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi negara (Rahmadian, 2019). Dalam kajian ekologi politik dan tata kelola, deteritorialisasi lingkungan masih belum banyak dibahas, padahal potensi dan kegunaannya sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana deteritorialisasi lingkungan dan bentuk-bentuk alih fungsi lahan di Kabupaten Banjar secara khusus area studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut. Selain itu, penelitian ini juga dimunculkan untuk merespons dinamika ekspansi pengalihfungsian lahan baik yang dilakukan korporasi (industri), pemerintah maupun oleh masyarakat. Sehingga, diharapkan dapat memberikan kebaruan terhadap cara pandang filosofis dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya terkait fungsi lingkungan lahan basah meliputi daerah rawa dan gambut.

## METODE

Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan instrumen observasi *live in*, FGD dan *in depth interview*, yang dikolaborasi dengan studi literatur untuk menelaah dan memahami bagaimana deteritorialisasi lingkungan dan bentuk-bentuk alih fungsi lahan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki sistem pertanian dan merupakan salah satu lumbung padi provinsi namun kini merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perubahan lahan secara masif merupakan kota penghubung antara dua kota terbesar di Kalimantan Selatan (Banjarmasin dan Banjarbaru). Wilayah Kabupaten Banjar memiliki 20 kecamatan. Salah satu kecamatan yang mulai mengalami proses konversi lahan persawahan yang sangat masif yaitu Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar. Penelitian ini mengambil 3 sampel desa dari 2 kecamatan tersebut yang merupakan representasi dari wilayah alih fungsi lahan industri (Kecamatan Gambut) yakni Desa Kayu Bawang dan wilayah alih fungsi lahan perumahan atau pemukiman (Kecamatan Kertak Hanyar) yakni Desa Tatah Belayung Baru dan Desa Manarap Baru. Pemilihan desa ini karena merupakan desa yang memiliki karakteristik pertumbuhan wilayah pemukiman/perumahan dan pertumbuhan industri paling cepat di wilayah Kalimantan Selatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Wilayah dan Tata Guna Tanah di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut

Kabupaten Banjar merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki sistem pertanian yang baik. Wilayah Kabupaten Banjar memiliki 20 kecamatan. Kecamatan yang banyak mengalami proses konversi lahan persawahan yakni Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut. Karakteristik wilayah Kecamatan Kertak Hanyar merupakan daerah dataran rendah, dan memiliki suhu rata-rata harian berkisar antara 27,15°c sampai dengan 32,05°c (BPS Kalsel, 2021).

Kondisi alam tersebut menjadikan sebagian besar wilayah Kecamatan Kertak Hanyar difungsikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berupa padi sawah. Hal ini menjadikan Kecamatan Kertak Hanyar sebagai salah satu daerah penghasil padi lokal yang ada di Kabupaten Banjar. Namun saat ini kebanyakan lahan pertanian di Kertak Hanyar sudah terkonversi menjadi lahan pemukiman dan industri sehingga kontribusinya relatif menurun drastis terhadap produksi pangan dalam skala Kabupaten (Statistik Daerah Kecamatan Gambut, 2016).

Di Kecamatan Kertak Hanyar, lokasi penelitian adalah desa Tatah Belayung Baru dan Desa Manarap Baru. Pemilihan desa tersebut karena merupakan desa yang memiliki karakteristik pertumbuhan wilayah pemukiman maupun perumahan komersil paling cepat. Desa Tatah Belayung Baru merupakan desa yang memiliki luas wilayah 2,10 km<sup>2</sup>/210 Ha. Lokasi Desa Tatah Belayung Baru merupakan penyangga atau daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, secara khusus berada dekat dengan Kelurahan Kelayan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya perubahan lanskap lingkungan lahan basah menjadi kawasan perumahan di desa tersebut. Selain itu, desa ini juga bisa diakses dari beberapa jalan utama di kota Banjarmasin seperti Jalan Lingkar Selatan tembus Basirih maupun jalan dalam kota Banjarmasin melalui Jalan Kelayan dan Jalan Gatot Subroto.

Sebagian besar wilayah desa ini merupakan tanah pertanian. Secara rinci, berikut data penggunaan lahan di Desa Tatah Belayung Baru:

Tabel 1.  
Tata Guna Tanah Desa Tatah Belayung Baru

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Tanah Sawah (sawah tadah hujan)	138,50 Ha
2	Permukiman	41,60 Ha
3	Pekarangan	4,15 Ha
5	Perkebunan	2,50 Ha
6	Luas prasarana umum lainnya:	21,25 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>208 Ha</b>

Sumber: Pemerintah Desa Tatah Belayung Baru, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa tanah sawah di desa Tatah Belayung Baru masih menjadi Kawasan terluas dengan jumlah sekitar 138,50 Ha dari total 208 Ha. Desa lain yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Manarap Baru. Desa Manarap Baru merupakan salah satu desa terluas di Kecamatan Kertak Hanyar dengan luas wilayah 800 ha/8 Km<sup>2</sup>. Wilayah Desa Manarap baru berada cukup dekat dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Kertak Hanyar, yakni berjarak 3 km atau waktu tempuh ±10 menit. Dekat pula dengan ibu kota Kabupaten Banjar (Martapura) yakni berjarak 40 km atau waktu tempuh ±1 jam, serta ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) yakni berjarak 10 km atau waktu tempuh ±20 menit. Lokasinya tersebut menjadikan Desa Manarap Baru sangat strategis untuk berbagai program-program pembangunan, baik program Nasional maupun program Daerah sangat. Program yang mencakup pembangunan fisik maupun pembangunan manusia yang cukup sering dilaksanakan di desa tersebut.

Saat ini, pemanfaatan Desa Manarap Baru terdiri dari lahan sawah, pemukiman, pekarangan, tanah rawa, tempat pemakaman, bangunan sekolah dan jalan. Berikut data tata guna lahan di Desa Manarap Baru:

Tabel 2.  
Tata Guna Tanah Desa Manarap Baru

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Lahan Sawah	504 Ha
2	Permukiman	75 Ha
3	Pekarangan	30 Ha
4	Tanah Rawa	180 Ha
5	Tempat Pemakaman Desa	2 Ha
6	Bangunan Sekolah	1 Ha
7	Jalan	8 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>800 Ha</b>

Sumber: Pemerintah Desa Manarap Baru, 2021

Wilayah Desa Manarap Baru dibagi dalam 2 (dua) zona, yakni di bagian utara dan barat dimanfaatkan sebagai zona hijau pertanian dan, di bagian selatan dan timur dimanfaatkan sebagai pusat permukiman/perumahan, yang di beberapa bagian juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pembagian zona ini merupakan hal baru sebab secara historis sebagian besar wilayah Desa Manarap Baru difungsikan untuk areal persawahan tadah hujan. Artinya, bila datang musim hujan maka semua lahan tergenang air dan apabila musim kemarau menjadi kering sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

Kecamatan kedua yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Gambut secara spesifik di Desa Kayu Bawang. Luas wilayah Desa Kayu Bawang adalah 17,77 km<sup>2</sup>/1.777 ha. Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Gambut ditanami padi sawah sebab mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Sebagai contoh pada tahun 2015, luas tanam di Kecamatan Gambut mencapai 8.998 ha, namun kemudian terjadi kerusakan tanaman seluas 129 ha, sehingga luas panennya menjadi 8.869 ha dengan hasil produksi mencapai 35.476 ton (Statistik Daerah Kecamatan Gambut Tahun 2016). Selain sebagai petani, sebagian masyarakat Kecamatan Gambut bekerja sebagai peternak, pedagang, buruh dan PNS, dan belakangan ini masyarakat yang bekerja di sektor jasa dan industri mulai meningkat pesat. Sektor industri dan jasa di wilayah Kecamatan Gambut berkembang pesat dikarenakan banyaknya lahan kosong di sepanjang pinggiran jalan provinsi yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan jasa.

Desa Kayu Bawang sebelum tahun 2015 merupakan sebuah wilayah pertanian yang cukup luas. Oleh karena adanya alih fungsi lahan membuat wilayah pertanian di desa ini menyusut. Tidak hanya lahan pertanian yang kian menyusut tetapi juga jalur-jalur air yang dulu merupakan bagian dari ekosistem mengalami penyumbatan, terkontaminasi limbah yang menyebabkan kegiatan petani terdampak. Hal tersebut ditengarai karena adanya alih fungsi lahan yang menghalangi daerah-daerah sirkulasi air.

### Dampak Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut

Penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel tiga desa, yakni desa Tatah Belayung Baru, Desa Manarap Baru dan Desa Kayu Bawang di Kabupaten Banjar mengindikasikan bahwa kepentingan ekonomi dieksekusi tanpa memperhatikan kepentingan ekologi. Dampak alih fungsi lahan menjadi perumahan sangat dirasakan oleh para petani tanah hujan di lingkungan lahan basah di Kabupaten Banjar. Permasalahan hama seperti tikus, sampah dan air yang tidak dapat turun karena alirannya terkurung oleh jalan, dan kawasan permukiman. Masifnya alih fungsi lahan menjadi perumahan memperparah keadaan yang didapat oleh petani. Sistem pertanian yang dahulu menerapkan sistem tadah hujan pun sudah tidak bisa lagi dilaksanakan, oleh sebab daerah resapan dan alirannya yang kian hilang oleh pembangunan perumahan. Secara lebih lengkap berikut adalah beberapa dampak alih fungsi lahan terhadap lingkungan lahan basah di Kabupaten Banjar:

Tabel 3.

Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Banjar

Dampak Terhadap Interaksi Manusia (Masyarakat) Dengan Lingkungan (Alam) Desa Tatah Belayung	
Corak tindakan manusia (masyarakat) terhadap lingkungan	Baik warga lokal maupun perumahan sama-sama acuh terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi pada saat sekarang ini. Di satu sisi, keengganan warga lokal didasarkan pada kenyataan bahwa sampah-sampah tersebut berasal dari warga perumahan, padahal sebelum adanya perumahan tidak pernah ditemukan tumpukan sampah seperti itu. Alhasil warga lokal melemparkan tanggung jawab tersebut ke RT, RW, Sekdes, Kepala Desa (aparatur desa) untuk ditangani.
Kondisi lingkungan	Secara umum, yang dapat ditemui adalah munculnya tumpukan sampah di pinggir jalan yang mengganggu warga akibat adanya perumahan. Serta kesusahan petani dalam bekerja di sawah akibat tingginya volume air karena resapan tanah yang rendah. Selanjutnya, petani dihadapkan pada ancaman bahwa kondisi pembuangan limbah sembarangan dari warga perumahan nantinya akan merembes ke lahan pertanian di sampingnya, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lahan tersebut.
Bencana ekologis	Bencana Banjir pada tahun 2021
Dampak Terhadap Interaksi Manusia (Masyarakat) Dengan Lingkungan (Alam) Desa Manarap Baru	
Corak tindakan manusia	Masyarakat desa memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh



(masyarakat) terhadap lingkungan	desa, akan tetapi tidak apik dalam menjaga alam itu sendiri. Terbukti dengan kebiasaan warga perumahan yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya membuat rugi warga sekitar serta mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti pembuangan limbah rumah tangga ke perairan sawah yang mengganggu kesuburan tanaman petani di sekitarnya.
Kondisi lingkungan	Lingkungan menjadi tercemar oleh pembuangan sampah atau limbah yang disebabkan oleh warga perumahan pada lahan kosong maupun perairan sawah di sekitarnya. Selain itu, lahan pertanian yang berjarak sekitar 20-30 meter dari perumahan pasti terdampak limbahnya, sehingga lahan tersebut tidak layak ditanami lagi.
Bencana ekologis	Dikarenakan serapan air yang berkurang, maka sirkulasi air tidak selancar yang dulu lagi. Ketika bencana banjir melanda di awal Januari 2021 lalu masyarakat meyakini bahwa faktor penyebab utamanya adalah adanya pembangunan perumahan di jalur sungai yang menutup kelancaran aliran air. Salah satu akibatnya bagi petani adalah semua bibit yang ditanam menjadi tenggelam dan mengalami gagal panen.
<b>Dampak Terhadap Interaksi Manusia (Masyarakat) Dengan Lingkungan (Alam) Desa Kayu Bawang</b>	
Corak tindakan manusia (masyarakat) terhadap lingkungan	Corak tindakan terhadap lingkungan yakni kecenderungan warga yang memiliki lahan tidak produktif untuk dijual ke pihak perumahan atau industri.
Kondisi lingkungan	Dampak terhadap kondisi lingkungan saat ini terlihat sangat nyata, misalnya limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan. Hal ini berdampak terhadap lahan pertanian dan kualitas tanah di sekitar perumahan. Sungai-sungai kecil yang ada juga sudah tersumbat oleh pembangunan gudang, yang menyebabkan air meluap dan membanjiri sawah. Limbah-limbah pembuangannya juga membuat hasil pertanian tidak begitu baik. Air yang berubah menjadi semakin asam tentunya menghambat kegiatan pertanian.
Bencana ekologis	Bencana ekologis yang dampaknya paling dirasakan masyarakat adalah banjir pada tahun 2021. Banjir yang terjadi diyakini merupakan dampak dari pembangunan perumahan yang mengabaikan pentingnya pembangunan drainase untuk menghindari genangan air dan berakibat pada terjadinya banjir. Terlihat pada kondisi jalan-jalan desa yang sebelumnya tidak pernah digenangi air namun setelah adanya perumahan jalan-jalan tersebut seringkali tergenang air, baik karena luapan maupun genangan dari air hujan.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Dapat dilihat dari penjelasan data di tabel diatas, perubahan lanskap lingkungan lahan basah dimulai sejak alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman oleh *developer* pengembang perumahan. Dengan adanya suatu permasalahan baru sebagai akibat dari adanya pembangunan perumahan, maka masyarakat yang sebelumnya menjaga kondisi lingkungan tetap bersih menjadi acuh terhadap lingkungan. Hal itu dibuktikan dengan menggunungnya tumpukan sampah yang ada di pinggir salah satu jalan desa. Karena mereka menganggap permasalahan tersebut bukan permasalahan warga lokal, melainkan masalah orang-orang perumahan. Baik warga lokal maupun perumahan sama-sama acuh terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi pada saat sekarang ini. Di satu sisi, keengganan warga lokal didasarkan pada kenyataan bahwa sampah-sampah tersebut berasal dari warga perumahan, padahal sebelum adanya perumahan tidak pernah ditemukan tumpukan sampah seperti itu. Alhasil warga lokal melemparkan tanggung jawab tersebut ke RT, RW, Sekdes, Kepala Desa (aparatur desa) untuk ditangani. Nilai-nilai budaya yang dulunya ada untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, kemudian menjadi pudar dengan adanya permasalahan tumpukan sampah yang tak terurus sebagai akibat dari adanya pembangunan perumahan. Hal ini tentu akan sangat berimplikasi pada lahan persawahan yang dahulu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi mayoritas warga.



Secara historis lahan basah di Kabupaten Banjar dominan pemanfaatannya adalah untuk lahan pertanian. Mayoritas masyarakat di desa-desa di Kabupaten Banjar menggantungkan hidupnya dari pertanian, yang didominasi pertanian pangan. Terdapat pula kawasan perikanan yang dikelola masyarakat dengan skema budidaya maupun dengan cara berburu. Sebagian wilayah Kabupaten Banjar kemudian terletak di antara dua kota besar di Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Setidak-tidaknya terdapat dua kecamatan yang seluruh wilayahnya terletak diantara dua kota tersebut, yakni Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar. Posisinya tersebut menjadi dilema tersendiri, di satu sisi menjadi keuntungan karena letaknya yang strategis memungkinkan munculnya sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat maupun untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain, letaknya tersebut menjadikannya strategis untuk pembangunan berbagai infrastruktur pendukung keberlangsungan aktivitas Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, baik infrastruktur ekonomi maupun pemukiman, pelayanan publik dan lain-lain, yang mengharuskan terjadinya deterolisasi lahan basah secara massif. Lahan basah yang sejak lama berfungsi sebagai lahan produksi masyarakat serta penopang kebutuhan pangan di Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya. Dimana dua kecamatan tersebut termasuk ke dalam wilayah pertanian yang paling produktif.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah berupaya mengakomodir dua kepentingan tersebut secara bersamaan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan membuat zonasi pemanfaatan. Zonasi tersebut ditandai dengan pembagian zona warna, dimana warna hijau merupakan zona yang hanya boleh digunakan untuk lahan pertanian. Kebijakan zona warna, yang mana itu merupakan kebijakan pemerintah langsung, dari pemerintah kabupaten, terus turun ke Badan Pertanahan Nasional. Di Desa Manarap Baru untuk pembangunan perumahan sudah dibatasi oleh pemerintah untuk pertanian, tidak boleh dibikin perumahan. Masalahnya, secara hukum peraturan itu harus ditaati, namun secara kenyataan peraturan selalu mempunyai celah untuk diakali ataupun dilanggar oleh pihak-pihak tertentu.

Fakta menunjukkan bahwa kebijakan zonasi ini masih banyak dilanggar. Di sisi lain penetapan kebijakan tata ruang merupakan kewenangan penuh dari pihak kabupaten. Dalam hal ini, pemerintah desa tidak memiliki wewenang dalam menentukan tata ruang di wilayahnya. Masalah lain adalah perubahan kepemimpinan di tingkat kabupaten yang biasanya dibarengi dengan perubahan kebijakan, minimal implementasi kebijakan dari yang ketat menjadi longgar. Hal tersebut berdampak pada tetap masifnya deterolisasi lahan basah di Kabupaten Banjar, termasuk pada zona hijau yang seharusnya peruntukannya hanya untuk lahan pertanian. Kepentingan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemukiman menjadi faktor yang determinan dalam menentukan dinamika deteritorialisasi lahan basah di Kabupaten Banjar. Sementara kedudukan vitalnya sebagai lahan produksi pangan semakin terkikis dari waktu ke waktu. Adapun untuk kepentingan perlindungan ekologis menjadi aspek yang paling terabaikan, maka Kabupaten Banjar menjadi salah satu kabupaten yang terdampak banjir paling parah pada awal tahun 2021 yang lalu. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi vital ekosistem lahan basah adalah sebagai pengendali banjir.

### **Perubahan Interaksi Manusia (Masyarakat) Terhadap Lingkungan Lahan Basah (Alam)**

Ekosistem lingkungan lahan basah termasuk rawa-rawa, danau, sungai, delta muara, kolam, sawah, adalah ekosistem yang paling beragam dan produktif (Lamsal et al, 2015). Ekosistem lahan basah penting dari sudut pandang konservasi dan pengelolaan berkelanjutan karena keanekaragaman flora dan faunanya yang sangat kaya. Beragam sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta produk khas lingkungan lahan basah di Kabupaten Banjar seperti ikan, lahan gambut, kayu, hasil hutan bukan kayu, ekowisata dan pengendalian banjir secara historis memberikan sumber pendapatan dan penghidupan bagi masyarakat lokal, secara khusus di Kalimantan Selatan. Namun, pertumbuhan penduduk dan gangguan antropogenik telah menggerus sumber daya dan ekosistemnya kini. Hilangnya ekosistem lahan basah, pada akhirnya juga akan berimplikasi pada kesejahteraan individu dan masyarakat lokal di Kalimantan Selatan. Masalah ini menjadi perhatian serius di mana beberapa masyarakat sangat bergantung pada sumber daya lahan basah. Kebijakan dan manajemen strategis pemerintah daerah pun dinilai sangat lemah dan tidak solutif. Akhirnya kompleksitas ini mempengaruhi konservasi dan pengelolaan sumber daya lahan basah secara berkelanjutan. Padahal, lahan basah sebagai sumber mata pencaharian diakui secara luas mampu menyediakan ekosistem yang berkontribusi pada kesejahteraan (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Eksplorasi dan degradasi lingkungan lahan basah sudah terjadi di hampir 50% lahan basah global dalam 150 tahun terakhir (O'Connell, 2003). Kerugian utama atas kondisi ini adalah termasuk penurunan tanah, perubahan kualitas air dan terancamnya keanekaragaman hayati. Eksplorasi yang berlebihan telah menimbulkan banyak kekhawatiran. Hilangnya habitat lahan basah dari penggunaan sumber daya yang



berlebihan mengakibatkan degradasi lingkungan secara massif (Xie et al, 2009). Di Kabupaten Banjar, kini sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dekat lahan basah, dan ketergantungan mereka pada sumber daya lahan basah, telah menurun. Masyarakat memiliki kesempatan terbatas untuk mata pencaharian. Padahal peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk melestarikan sumber daya lingkungan lahan basah ini adalah kemampuan adaptif mereka dalam penyesuaian dengan perubahan iklim global dengan kearifan lokalnya (Jha, 2008). Peningkatan kelembagaan dan partisipasi lokal serta perlunya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya lahan basah memang sangat mutlak diperlukan (Williams, 2002).

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya untuk kegiatan konservasi sumber daya alam. Inklusi masyarakat adalah suatu keharusan bagi konservasi lingkungan lahan basah jangka panjang di Kalimantan Selatan (Andrade & Rhodes, 2012). Perundang-undangan, kebijakan, dan program yang mengakomodasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dalam konservasi sumber daya akan menghemat biaya dan waktu pelaksanaan dalam konservasi. Di negara berkembang, di mana ketahanan pangan dan kemiskinan, biasanya mendapat prioritas lebih tinggi daripada perlindungan lingkungan, konservasi lahan basah sulit jika masyarakat lokal tidak memahami nilai strategis dan ekologis lahan basah (Wood et al., 2002). Untuk konservasi dan pengelolaan yang sukses, masyarakat lokal yang berpartisipasi harus sepenuhnya menyadari pentingnya lahan basah sebagai bagian dari siklus alam, serta menyadari posisi penting manusia dalam siklus perubahannya (Williams, 2002).

Partisipasi masyarakat dengan pengetahuan tradisional, keterampilan, dan praktik kearifan lokal dapat membantu konservasi sumber daya sambil terus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pentingnya mencari penghidupan dengan pilihan diversifikasi pendapatan yang memungkinkan konservasi tetap dilaksanakan tanpa melakukan eksploitasi lahan basah tanpa merusak mata pencaharian masyarakat. Jika aspek budaya dan kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi, maka sangat mungkin bahwa kepentingan ekonomi dari sumber daya lahan basah dapat dicapai bersamaan dengan tujuan konservasi. Keterlibatan sukarela lebih penting bukan hanya sekedar kesadaran saja dalam kegiatan konservasi. Penggunaan pendekatan yang berpusat pada masyarakat sangat ideal untuk mengidentifikasi kerentanan bencana ekologis dan menerapkan solusi yang tepat. Peningkatan peran lembaga-lembaga adat dan mungkin juga agama sama penting untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Konservasi kegiatan yang dilakukan organisasi/lembaga lokal lebih efektif dibandingkan proyek eksternal yang berasal dari luar daerah. Konservasi berbasis masyarakat adalah alternatif yang baik karena merupakan alat yang efektif dalam penyelesaian konflik karena melibatkan seluruh partisipasi masyarakat secara aktif dan bergerak secara kolektif. Pendekatan konservasi berbasis masyarakat di lingkungan lahan basah telah di adopsi di beberapa negara lain di Asia selama lebih dari satu dekade dan telah sangat berhasil dalam mengamankan partisipasi publik dalam konservasi (Lamsal, et al., 2015).

Mengingat peran lingkungan lahan basah sangat penting sebagai sumber daya dalam penghidupan masyarakat secara khusus di Kabupaten Banjar. Lahan basah menyediakan berbagai kebutuhan dan merupakan atribut nilai bagi masyarakat Banjar. Disisi lain, tentu lingkungan lahan basah juga menghasilkan nilai ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, meskipun undang-undang maupun peraturan daerah sudah dirancang untuk melindungi lingkungan lahan basah, kini ia terus terdegradasi pada kondisi yang mengkhawatirkan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan (Lanas & Turpie, 2009). Kondisi ini karena kurangnya pemahaman ekologi serta tekanan kepentingan ekonomi dan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan (Terer et al, 2004). Di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, lingkungan lahan basah telah terdegradasi sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan baik untuk peruntukan industri, pemukiman maupun kebutuhan lainnya. Padahal pemahaman tentang nilai ekologi lahan basah sangat penting dalam kegiatan konservasi dan pengembangan prioritas kebijakan pembangunan tanpa harus mengucilkan peran dan kebermanfaatan lingkungan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Proses deteritorialisasi mulai memunculkan kontradiksi-kontradiksi yang nyata, yakni kepentingan-kepentingan para aktor yang menjadikan dinamikanya menjadi lebih kompleks. Hasil penelitian pada Desa Kayu Bawang, Desa Tatah Belayung Baru dan Desa Manarap Baru menunjukkan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari teritorialisasi tidak hanya perubahan pemaknaan dalam konteks ruang spasial, melainkan juga pemaknaan terhadap nilai-norma yang berlaku.

Perubahan lahan secara signifikan terjadi pada masyarakat Desa Kayu Bawang ketika perusahaan industri hadir dan mulai beroperasi pada tahun 2000-an di Kecamatan Gambut. Sedangkan pada

masyarakat Desa Tatah Belayung Baru dan Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar perubahan mulai terjadi sejak pembukaan akses jalan Provinsi (Jl. A Yani) pada tahun 1970-an. Namun perubahannya dalam skala kecil atau tidak signifikan. Bahkan sebagian besar masyarakat pada awalnya tidak menyadari kehadiran industri-industri pergudangan dan pembukaan akses jalan provinsi tersebut di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar. Secara historis, pada awalnya perusahaan industri pergudangan yang ada bersifat “pasif” dalam konteks deteritorialisasi. Namun pada perkembangannya perusahaan-perusahaan tersebut berubah menjadi lebih aktif yang salah satunya didorong oleh kesadaran bahwa terdapat potensi besar dari luasnya lahan kosong yang bisa dikonversi untuk berbagai kepentingan, khususnya untuk pembangunan pemukiman penduduk (perumahan) yang dianggap solusi atas kondisi daya tampung lahan di kota Banjarmasin yang semakin menipis. Pada akhirnya kepentingan tersebut sejalan dengan upaya peningkatan akses perumahan bagi karyawan perusahaan industri yang lebih dekat dengan tempat bekerja, serta dengan harga yang masih relatif murah.

Pemerintah Kabupaten Banjar, agar mengimplementasikan strategi alih fungsi lahan yang lebih berkelanjutan dengan mempertimbangan aspek ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal serta membangun kerjasama (kolaborasi) dengan masyarakat dan pihak lainnya (swasta dan NGO) yang saling menguntungkan kedua belah pihak terkait dengan perumusan kebijakan alih fungsi lahan. Dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan secara komprehensif dan mendalam terkait dengan manfaat dilakukannya kerjasama, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan namun juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrade, G. S. M., and J. R. Rhodes. (2012). Protected areas and local communities: an inevitable partnership toward successful conservation strategies? *Ecology and Society* 17(4): 14.
- BBC. (2020). Floods in South Kalimantan were 'triggered' by reduced primary and secondary forest areas, KLHK: 62.8% decrease in forest area in the Barito watershed. More at <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55696841>. Accessed on Feb 2, 2021.
- BPS Kabupaten Banjar. (2020). *PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Martapura.
- BPS Kabupaten Banjar. (2020). *PDRB Kabupaten Banjar Menurut Pengeluaran 2015-2019*. Martapura.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2019). *PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha*. Banjarmasin.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2019. *Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II-2020 (April-Juni)*. Banjarmasin.
- Goldblatt D. (2015). *Critical Ecological Analysis*. Resist Book, Yogyakarta. 77-92.
- Jha, S. (2008). Status and conservation of lowland Terai wetlands in Nepal. *Our Nature* 6(1):67-77.
- Krisnaningtyas, T & Trimarmanti, E. (2014). Evaluation of Subdistrict Land Use Changes in the Cisadane Watershed, Bogor Regency. *Regional and Environmental Journal*. 2 (1):55-72.
- Lamsal, P., K. P. Pant, L. Kumar, and K. Atreya. (2015). Sustainable livelihoods through conservation of wetland resources: a case of economic benefits from Ghodaghodi Lake, western Nepal. *Ecology and Society* 20 (1): 10.
- Lannas, K. S. M., and J. K. Turpie. (2009). Valuing the provisioning services of wetlands: contrasting a rural wetland in Lesotho with a peri-urban wetland in South Africa. *Ecology and Society* 14(2): 18.
- Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being: wetlands and water synthesis*. World Resources Institute, Washington, D.C., USA. [online] URL: <http://www.unep.org/maweb/documents/document.358.aspx.pdf>.
- O'Connell, M. J. (2003). Detecting, measuring and reversing changes to wetlands. *Wetlands Ecology and Management* 11 (6):397-401.
- Pemerintah Kabupaten Banjar. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025*. Bappedalitbang Kabupaten Banjar.
- Pemerintah Kabupaten Banjar. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kecamatan Kertak Hanyar Dan Pembentukan Kecamatan Tatah Makmur Dalam Wilayah Kabupaten Banjar*.
- Pemerintah Kabupaten Banjar. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Gambut Tahun 2016*.
- Pemerintah Kabupaten Banjar. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2016*.
- Rahmadian, F. (2018). Political Economy Analysis of Oil Palm Plantation Expansion: Actors and Deterritorialization. Thesis. IPB University. Bogor



- Terer, T., G. G. Ndiritu, and N. N. Gichuki. (2004). Socio-economic values and traditional strategies of managing wetland resources in Lower Tana River, Kenya. *Hydrobiologia* 527:3-14.
- Williams, W. D. (2002). Community participation in conserving and managing inland waters. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 12(3):315-326.
- Xie, Z., X. Xu, and L. Yan. (2009). Analyzing qualitative and quantitative changes in coastal wetland associated to the effects of natural and anthropogenic factors in a part of Tianjin, China. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 86(3):379-386.